



Ribuan Penerima Bansos Dicoret

JOGJA—Ribuan orang di DIY dihapus dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) karena dianggap tidak layak menerima. Tak sedikit dari mereka berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

Yusef Leon, Lugas Subhanah, & Utang Hasanudin
redaksi@harianjogja.com

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosakertrans) Kota Jogja menyebutkan ada 895 data calon penerima bantuan sembako dari Pemerintah Pusat yang dihapus karena dinilai sudah sejahtera. Plt Kepala Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial Dinsosakertrans Kota Jogja, Bandoro Budi Nugroho, mengatakan verifikasi dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAP) milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jogja. Data dari Pusat kemudian dibandingkan lewat SIAP untuk mengetahui informasi penerima yang tidak layak.

► Data Kementerian Sosial belum diperbarui sehingga PNS terdaftar sebagai penerima bansos.
► Verifikasi dilakukan dengan memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) penerima.

Contohnya, Kota Jogja mendapat daftar 9.020 penerima sembako yang terdaftar dalam kartu keluarga sejahtera (KKS) dari Kementerian Sosial. Namun, setelah verifikasi, hanya 8.125 orang yang layak menerima bantuan. Data baru itu tetap akan diverifikasi supaya tidak ada penerima ganda. Verifikasi dilakukan dengan memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) penerima. Verifikator kemudian akan mendapatkan informasi mengenai pekerjaan dan data lainnya dari calon penerima bantuan sosial. Jika ada nama penerima yang ternyata bekerja sebagai PNS, petugas akan langsung menghapusnya.

► Halaman 10

Ribuan Penerima...

Kemungkinan PNS penerima bansos juga terjadi di Sleman. Kepala Dinas Sosial Sleman, Eko Suhargo, menjelaskan PNS masuk dalam data penerima bantuan sosial karena data dari Kementerian Sosial belum diperbarui. Sementara perubahan status sosial di masyarakat sangat dinamis, termasuk beberapa orang yang kini menjadi PNS.

"Kami bekerja sama dengan Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pelayan Sipil) Sleman karena di sana dapat diketahui siapa saja yang berstatus PNS," ujarnya, Senin (22/11).

Saat ini, Dinas Sosial Sleman tengah memverifikasi (cleansing) data penerima bantuan sosial. Pembersihan dilakukan dua kali. Pertama menggunakan sistem yang mengacu data Disdukcapil Sleman. Kedua, meminta masukan dari kalurahan yang lebih paham perkembangan masyarakat di wilayahnya.

Pada cleansing pertama, dari total 15.372 penerima, sebanyak 1.724 penerima dianggap tidak memenuhi kriteria sehingga tidak akan disalurkan. Jumlah ini kemungkinan masih akan terus bertambah, terutama setelah mendapat masukan dari kalurahan. Diperkirakan, hanya sekitar 60% dari total penerima lolos proses verifikasi. Penyaluran bantuan sosial PPKM tahap kedua akan

dilakukan maksimal hingga 31 November mendatang. Dalam program ini, setiap penerima mendapatkan sebesar Rp200.000 per bulan selama enam bulan, sehingga total bansos yang diterima Rp1,2 juta.

Cleansing data ini, kata dia, juga berlaku bagi program bantuan sosial lainnya seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan sosial sembako. "Setiap penerima hanya bisa menerima bantuan sosial dari satu program, tidak boleh double," katanya.

Dana desa di Sleman juga dialokasikan untuk bantuan langsung tunai (BLT). Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Budiharjo, mengatakan pada 2021, hingga November ini telah disalurkan sebesar Rp42 miliar BLT dari dana desa. Jumlah ini cukup besar persentasenya, dari total Dana Desa 2021 sebesar Rp110 miliar. Pada November ini, BLT disalurkan kepada 12.283 penerima dengan anggaran sebesar Rp3,6 miliar. "Setiap penerima mendapatkan Rp300.000 per bulan," ungkapnya.

Di Bantul, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Bantul mendapat tambahan 15.000 penerima bantuan pangan nontunai (BPNT) dari Kementerian Sosial. Namun, banyak yang tidak layak mendapatkan bantuan.

Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinsos P3A Bantul, Anwar Nur Fahrudin, mengatakan total penerima BPNT di Bantul sampai saat ini sebanyak 81.245 kepala keluarga (KK).

Kami mendapat tambahan 15.000 penerima manfaat BPNT. Sebagian enggak layak, ada banyak tidak layak. Ada yang istrinya PNS, ada yang keluarganya PNS. Keluarganya TNI Polri ada, ada yang sudah proses verifikasi. Sekarang desa yang memverifikasi, kecamatan verifikasi, setelah selesai baru akan rekap," kata Anwar, Senin.

Beberapa penerima sudah mengembalikan bantuan karena istrinya PNS. Selain memverifikasi data tambahan penerima BPNT, Pemkab Bantul juga akan memverifikasi ulang penerima BPNT dan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Jumlah penerima bantuan PKH saat ini sebanyak 55.222 kepala keluarga dan BPNT 81.245 kepala keluarga. Verifikasi akan dilakukan melalui musyawarah kalurahan yang rencananya diselenggarakan pada awal tahun depan.

"Penghapusan atau pencoretan data penerima yang tidak layak harus melalui musyawarah kalurahan agar kalau ada gugatan, kami punya dasar yang kuat. Kami tidak sembarangan mencoret," kata Anwar.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005